

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH INDUK PATRIOT DI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

Wirapraja Yudinia Putera

NPP. 32.0406

Asdaf Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: 32.0406@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Tjahjo Suprajogo, M. Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): West Java Province experienced an increase in waste generation from 2019 to 2022, but decreased in 2023. In addition, Bekasi City is the city with the highest waste volume in West Java Province, ranking second after Bekasi Regency. In 2023, Bekasi City collected 637,778.59 tons of waste, making it the second city in West Java Province. Waste management remains a major issue in Bekasi City, despite the implementation of the Patriot Central Waste Bank Program (BSIP). The increasing number of waste bank units is not accompanied by an increase in managed waste volume, indicating suboptimal policy implementation. **Purpose:** This study aims to analyze the implementation of the waste management policy through the BSIP program in Bekasi City. **Method:** This research uses a descriptive qualitative approach. This approach was chosen because it is able to describe and understand in depth the public policies that occur, especially the implementation of waste management policies in Bekasi City. The research was conducted at the Bekasi City Environmental Agency using purposive sampling and snowball sampling techniques. The main informants consisted of 7 informants, consisting of the Head of Division at the Environmental Service, Director of the Patriot Parent Waste Bank, Treasurer of the Waste Bank, Secretary of the Waste Bank, Waste Bank Officers and Waste Bank Customers. Data collection techniques included interviews, direct observation, and documentation. Data were analyzed using the Miles & Huberman model thematically through the process of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The theory used in this research is Knill & Tosun's (2020) policy implementation theory. **Result:** The findings show that while the policy has been implemented in accordance with regulations, its effectiveness remains limited. Key obstacles include lack of public education and outreach, inadequate monitoring and evaluation, suboptimal reporting from waste bank units, and budget constraints. However, local government regulations and partnerships with CSR initiatives provide important support. **Conclusion:** To enhance the implementation, it is necessary to strengthen monitoring and evaluation, intensify public education, ensure systematic reporting, and allocate proportional budgets. This study is expected to serve as a reference for developing more effective and participatory community-based waste management policies.

Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Patriot Central Waste Bank

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pada tahun 2021 jumlah sampah yang terkelola sebesar 21,03% dari jumlah sampah yang masuk ke Bank Sampah Unit. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah sampah yang terkelola yakni sebesar 26,67%. Kemudian pada tahun 2023, jumlah sampah yang terkelola meningkat sebesar 100%. Dilihat dari jumlah sampah yang masuk ke Bank Sampah Unit tiga tahun tersebut selalu mengalami penurunan, sementara jumlah Bank Sampah Unit yang aktif mengalami penambahan sebanyak 108 unit .

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) di Kota Bekasi **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan dan memahami secara mendalam kebijakan publik yang terjadi, khususnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi. Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Informan utama terdiri dari 7 informan, yang terdiri dari Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup, Direktur Bank Sampah Induk Patriot, Bendahara Bank Sampah, Sekretaris Bank Sampah, Petugas Bank Sampah dan Nasabah Bank Sampah. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model Miles & Huberman secara tematik melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Knill & Tosun (2020). **Hasil/Temuan:** Penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan BSIP secara umum telah sesuai dengan regulasi yang ada, namun belum berjalan maksimal. Faktor penghambat utama meliputi minimnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya monitoring dan evaluasi, keterbatasan pelaporan dari unit bank sampah, serta keterbatasan anggaran. Di sisi lain, faktor pendukung mencakup adanya regulasi daerah yang mendukung dan kemitraan dengan CSR. **Kesimpulan:** Diperlukan upaya penguatan monitoring dan evaluasi, edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, pelaporan yang sistematis dan berjenjang, serta alokasi anggaran yang proporsional agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan untuk pengembangan kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat secara lebih optimal dan partisipatif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Bank Sampah Induk Patriot

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Torkayesh, A. (2022), pertumbuhan populasi perkotaan serta perkembangan industri dan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir dianggap sebagai penyebab utama dari jumlah timbulan sampah yang terus meningkat dan pencemaran lingkungan. Akibatnya, pengelolaan sampah yang berkelanjutan telah menjadi salah satu elemen penting untuk memenuhi tujuan pembangunan dan menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan. Masalah pengelolaan sampah menjadi tantangan serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota

Bekasi. Kota ini menduduki peringkat kedua tertinggi dalam jumlah timbulan sampah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023. Meningkatnya jumlah penduduk, pola konsumsi, dan urbanisasi memperparah volume sampah yang dihasilkan. Meskipun Kota Bekasi memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu, kapasitasnya telah melampaui batas maksimal. Hanya sekitar 70% dari 1.800 ton sampah harian yang dapat diangkut ke TPA, sementara sisanya menumpuk dan menyebabkan munculnya tempat pembuangan liar yang merusak estetika kota serta berdampak pada kesehatan dan lingkungan masyarakat (Fadlurrohman, 2022).

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi telah menyusun kebijakan strategis melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 yang mendorong pengelolaan sampah secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu bentuk implementasinya adalah pembentukan Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) sebagai lembaga non-kedinasan yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). BSIP bertugas membina dan mengkoordinasikan ratusan unit bank sampah yang tersebar di seluruh kecamatan. Harapannya, keberadaan BSIP mampu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA dan mengubah paradigma masyarakat bahwa sampah bukan sekadar limbah, melainkan sumber daya ekonomi potensial.

Namun demikian, meskipun jumlah unit Bank Sampah di Kota Bekasi terus bertambah dari tahun ke tahun, volume sampah yang berhasil dikelola justru mengalami penurunan. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal. Tantangan-tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan dan edukasi kepada masyarakat, lemahnya sistem pelaporan dari unit bank sampah, hingga rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah secara mandiri masih menjadi hambatan besar dalam penerapan program ini. Data menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan tidak hanya tergantung pada ketersediaan lembaga pengelola, tetapi juga pada sistem implementasi yang terintegrasi dengan baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Program Bank Sampah Induk Patriot di Kota Bekasi telah dilaksanakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan tersebut serta mengidentifikasi upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan peran BSIP sebagai bagian dari solusi pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam perumusan kebijakan publik, khususnya di bidang pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Program Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) di Kota Bekasi menunjukkan berbagai upaya perbaikan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat, terutama dalam aspek peningkatan jumlah Bank Sampah Unit (BSU) aktif dan pelibatan komunitas dalam prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). Namun, berdasarkan temuan lapangan dan analisis data, terdapat tantangan signifikan yang menghambat optimalisasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Beberapa permasalahan utama meliputi rendahnya efektivitas pelaporan BSU, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, minimnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai bank sampah dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat lebih berfokus pada pendekatan partisipatif masyarakat (Abdussamad et al., 2022; Dewi, 2019), aspek regulatif dan sosial budaya (Solihah & Rohman, 2024), serta kepatuhan dan kinerja pelaksanaan (Cahyadi et al., 2018). Akan tetapi, kajian yang secara

komprehensif menilai implementasi kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan enam faktor kunci yang dirumuskan oleh Knill & Tosun (2020) yakni instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial masih belum banyak dilakukan, khususnya dalam konteks kebijakan daerah perkotaan di Indonesia seperti Kota Bekasi.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menerapkan teori implementasi kebijakan dari Knill & Tosun sebagai kerangka analisis utama. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih sistematis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui BSIP. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian implementasi kebijakan lingkungan, tetapi juga menyajikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di berbagai daerah. Abdussamad et al. (2022) meneliti pelaksanaan program “Gerakan Satu Desa Satu Bank Sampah” di Kabupaten Tulungagung dan menemukan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah akibat kurangnya kesadaran dan pemahaman. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Edward III dalam Wahab (2022) dan pendekatan kualitatif. Fokusnya pada peran masyarakat dalam keberhasilan program bank sampah, berbeda dari penelitian ini yang lebih menitikberatkan pada dimensi administratif dan kelembagaan.

Cahyadi et al. (2018) dalam penelitiannya di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa meskipun jumlah bank sampah meningkat, efektivitas pengelolaan sampah masih rendah. Mereka menggunakan teori Ripley & Franklin (1986) dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi dan kelancaran rutinitas. Penelitian ini berbeda karena konteks wilayah dan kerangka teoretis yang digunakan, yakni Knill & Tosun (2020).

Dewi (2019) meneliti kegagalan program Bank Sampah “Gema Bersatu” di Gampong Ateuk Pahlawan, Banda Aceh. Ia menemukan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dan minimnya dukungan dana menjadi kendala utama. Menggunakan teori Ripley & Franklin (1986), penelitian ini lebih fokus pada penyebab kegagalan dan konteks mikro, sementara penelitian ini mengkaji secara sistemik dari perspektif kelembagaan dan implementasi kebijakan.

Solihah dan Rohman (2024) mengangkat perspektif keagamaan melalui fiqh Al-Bi’ah dalam implementasi kebijakan bank sampah di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai religius dapat memperkuat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Meskipun menarik, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pendekatan normatif dan nilai, sedangkan penelitian ini lebih teknokratik dan struktural.

Wahyudin dan Susetyo (2024) mengkaji program bank sampah di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan pendekatan teori implementasi dari George Edward III. Mereka menyoroti pentingnya komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Penelitian ini serupa dari sisi fokus pada implementasi kebijakan, namun berbeda dari segi lokasi, unit analisis, serta teori yang digunakan.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus menggunakan teori implementasi kebijakan dari Knill & Tosun (2020) yang mencakup enam faktor utama: pemilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Penelitian ini difokuskan pada implementasi

Program Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) di Kota Bekasi sebagai bentuk kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang lebih komprehensif dalam menilai keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat kota.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dalam mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Program Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) di Kota Bekasi dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari Knill dan Tosun (2020), yang mencakup enam faktor: pemilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Pendekatan ini memberikan dimensi analitis yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada aspek partisipasi masyarakat atau efektivitas operasional secara parsial.

Kebaruan lainnya terletak pada konteks empiris yang diangkat, yaitu Kota Bekasi sebagai salah satu kota dengan timbunan sampah terbesar di Provinsi Jawa Barat, yang sekaligus menghadapi tantangan serius dalam kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) dan pelaksanaan program berbasis masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menganalisis efektivitas program BSIP dalam menurunkan volume sampah, tetapi juga mengevaluasi kesenjangan antara penambahan unit bank sampah dengan volume sampah yang dikelola, serta efektivitas pengawasan dan pelaporan. Selain itu, data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan dan observasi lapangan menjadikan hasil penelitian ini aktual dan kontekstual. Penelitian ini menyajikan kontribusi strategis dalam bentuk rekomendasi kebijakan untuk penguatan kelembagaan BSIP, perbaikan sistem pelaporan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas penerapan teori implementasi kebijakan dalam konteks pengelolaan sampah berbasis masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pengembangan model kebijakan pengelolaan sampah yang lebih adaptif dan partisipatif di perkotaan.

Disisi lain kebaruan yang terletak pada pendekatan partisipatif berbasis masyarakat yang dikaji dalam konteks lokal Kota Bekasi, di mana partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dari efektivitas kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian ini juga mengungkap belum optimalnya pelaporan, edukasi, dan monitoring, serta bagaimana strategi pelibatan mitra CSR dan pelaporan berjenjang dapat menjadi solusi konkret untuk memperkuat implementasi kebijakan.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya seperti Abdussamad et al. (2022) di Bone Bolango yang menitikberatkan pada program desa berbasis bank sampah, atau Solihah & Rohman (2024) di Bangkalan yang mengintegrasikan pendekatan fiqh Al-Bi'ah. Selain itu, Dewi (2019) hanya fokus pada penyebab kegagalan operasional bank sampah di Banda Aceh, sedangkan penelitian ini lebih menekankan upaya optimalisasi implementasi kebijakan secara struktural dan lintas sektor. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa model analisis kebijakan pengelolaan sampah yang berbasis komunitas, mengedepankan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra strategis sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di perkotaan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Program Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) pada Dinas Lingkungan Hidup di

Kota Bekasi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta upaya optimalisasi kebijakan tersebut.

II. METODE

Metode penelitian kualitatif kerap dianggap sebagai pendekatan baru karena penyebarannya yang belum terlalu lama dikenal secara luas. Metode ini berlandaskan pada filsafat positivisme, sehingga sering disebut postpositivistik. Selain itu, metode ini juga disebut sebagai pendekatan artistik karena pelaksanaannya bersifat fleksibel dan tidak terpaku pada pola yang kaku. Metode ini juga dikenal sebagai interpretatif karena pengumpulan datanya lebih menekankan pada penafsiran terhadap temuan yang diperoleh langsung dari lapangan (Nurdin dan Hartati, 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Program Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara komprehensif dalam konteks nyata serta mengungkap dinamika pelaksanaan kebijakan berdasarkan perspektif pelaku yang terlibat langsung di lapangan (Rokhamah, 2024).

Menurut Punch (2009), pendekatan kualitatif bersifat interpretatif dan menekankan makna subjektif dari tindakan sosial, sehingga data yang diperoleh berasal dari penafsiran terhadap fenomena empiris yang ditemukan di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap pelaksanaan Program Bank Sampah Induk Patriot.

Informan penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling* untuk menjangkau aktor kunci seperti Kepala Bidang Pengurangan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Direktur BSIP, Sekretaris, serta Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan BSIP. Selain itu, teknik snowball sampling digunakan untuk menjangkau informan tambahan seperti petugas dan masyarakat yang terlibat langsung sebagai nasabah Bank Sampah. Pemilihan informan ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang beragam dan relevan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas pengelolaan sampah di BSIP maupun Bank Sampah Unit (BSU) di beberapa kecamatan di Kota Bekasi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengumpulan dan pemilahan sampah. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji dokumen-dokumen seperti Peraturan Daerah Kota Bekasi, Peraturan Wali Kota, SOP BSIP, laporan kegiatan, laporan keuangan, serta data kuantitatif terkait volume sampah yang dikelola selama periode 2021 hingga 2023.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi: (1) reduksi data, yaitu proses memilih data yang relevan dan menyaring informasi penting; (2) penyajian data secara naratif untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi; dan (3) penarikan kesimpulan berdasarkan pola, kecenderungan, serta hubungan antar fenomena yang ditemukan dalam proses penelitian. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data dengan mengombinasikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis.

Seluruh analisis dalam penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan Knill & Tosun (2020), yang mengevaluasi pelaksanaan kebijakan melalui enam dimensi: pemilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Teori ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Bekasi serta membantu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan Program Bank Sampah Induk Patriot.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bekasi

Bank sampah adalah salah satu metode pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mendorong keterlibatan langsung warga dalam menjaga lingkungan. Sistem ini menyediakan berbagai instrumen yang bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar secara mandiri mengelola sampah rumah tangga dan menukarkannya menjadi bentuk tabungan. Instrumen tersebut harus dirancang sedemikian rupa agar menciptakan hubungan saling menguntungkan, sehingga masyarakat memperoleh manfaat nyata dari partisipasi mereka (Wijayanti, 2015).

Kebijakan publik pada hakikatnya adalah keputusan yang diambil oleh lembaga atau pejabat pemerintah dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan ini dapat berupa pemilihan tindakan tertentu atau bahkan keputusan untuk tidak bertindak sama sekali (kebijakan tanpa tindakan), demi mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan umum (Khairi, 2008). Menurut Knill dan Tosun (2020), implementasi kebijakan merupakan tahap dalam proses kebijakan publik di mana suatu kebijakan dijalankan oleh aktor dan institusi yang memiliki tanggung jawab. Menurut Grindle dalam Rahmadanita (2018), mengemukakan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan dalam mencapai hasil (*outcomes*) sangat ditentukan oleh kegiatan program yang telah dirancang serta ketersediaan pembiayaan yang memadai. Selain itu, dua faktor utama yang memengaruhi jalannya implementasi adalah isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks pelaksanaannya (*context of policy*).

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat berbagai faktor yang berperan sebagai pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan kebijakan program Bank Sampah Induk Patriot. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pembakaran sampah (insinerasi) telah lama digunakan sebagai metode umum dalam pengelolaan sampah selama beberapa dekade, namun keduanya membawa dampak serius terhadap lingkungan, seperti pencemaran air tanah, degradasi lahan pertanian, dan pencemaran udara. Untuk memberi insentif pada pengalihan limbah ke posisi yang lebih tinggi pada hierarki limbah (Martin dan Scott, 2003), serta opsi retensi nilai lainnya seperti perbaikan, penggunaan kembali, dan produksi ulang, beberapa negara telah mengadopsi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat nasional (Malek, 2023). Salah satu langkah dalam mengatasi masalah persampahan tersebut, pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan suatu kebijakan yaitu program Bank Sampah Induk Patriot (BSIP). Dimana program ini ditujukan guna mengelola sampah dengan baik serta mengurangi jumlah atau volume sampah di Kota Bekasi yang tiap tahunnya semakin meningkat.

3.1.1 Pemilihan Instrumen Kebijakan

Pemilihan instrumen kebijakan dalam implementasi Program Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) di Kota Bekasi menunjukkan ketepatan strategi pemerintah dalam mengatasi permasalahan timbulan sampah. Ketepatan instrumen ini tercermin dari adanya dasar hukum yang jelas, yaitu Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10A Tahun 2017, yang menetapkan BSIP sebagai mitra resmi dari Dinas Lingkungan Hidup. Legalitas ini memberikan kelembagaan dan legitimasi yang kuat bagi BSIP untuk menjalankan peran strategisnya sebagai pengelola sampah berbasis masyarakat. Dengan struktur organisasi yang tertata dan pembiayaan dari APBD serta sumber sah lainnya, instrumen kebijakan ini mendukung pelaksanaan program secara optimal dan berkelanjutan.

Kemudahan instrumen juga menjadi aspek penting dalam pemilihan kebijakan ini. Sebagai mitra pemerintah, bukan bagian struktural dari dinas, BSIP memiliki fleksibilitas tinggi dalam operasional dan inovasi. Hal ini memungkinkan program seperti pengelolaan sampah organik melalui budidaya maggot untuk berkembang pesat. Dari data yang disajikan,

terlihat peningkatan signifikan dalam jumlah titik pengadaan maggot dari 10 titik pada tahun 2023 menjadi 35 titik pada 2024. Lonjakan ini mencerminkan efektivitas pendekatan yang dilakukan, sekaligus menandakan bahwa instrumen kebijakan yang dipilih mampu mendorong keterlibatan masyarakat dan efisiensi pengelolaan lingkungan.

Selain itu, dukungan dari sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) turut memperkuat efektivitas kebijakan ini. Perusahaan seperti Pertamina menunjukkan kontribusi nyata dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti kandang maggot dan bibit ternak, yang diarahkan kepada komunitas rentan seperti sekolah alam. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa pemilihan instrumen kebijakan yang melibatkan multipihak tidak hanya tepat, tetapi juga memperluas jangkauan dan daya ungkit program pengelolaan sampah di Kota Bekasi. Hal ini menjadi contoh implementasi kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan lokal.

3.1.2 Desain Kebijakan Insentif Pemberian *Coorporate Social Responsibility* (CSR)

No	Nama Pemberi CSR	Penerima	
		BSI Patriot	BSU
1	BNi	BSI Patriot	Jasmine
2	LSP/BNSP Unisma		JLC/Koja Asih
3	PT Bahtera Adhiguna - PLN		JLC/Koja Asih
4	PT Banyu Media Digital		Padat Karya
5	PT Coca Cola EuroPacific Indonesia		Kalpataru
6	PT Danone / Aqua	BSI Patriot	Nasio
7	PT Indesim Coalindo, dkk		JLC/Koja Asih
8	PT KAI		Razby Asri
9	PT Le Minerale		Kalpataru
10	PT May Bank Securitas Indonesia		Nasio
11	PT Patria (PT. UTPE)		Negar B
12	PT Pegadaian	BSI Patriot	Seger Ayem, Nasio, Berlian
13	PT Pelsart Tambang Perkasa, dkk		JLC/Koja Asih
14	PT Pertamina Peduli		Jasmine, Isara, SATM
15	PT PNM	BSI Patriot	JLC, Arjuna
16	PT RACKIT / DETTOL		Jasmine
17	PT Tetrapaast		Dashat
18	PT. Astra Internasional TBK.		Padat Karya
19	PT. HALEON		Jasmine
20	PT. Niramias Inaco		Padat Karya
21	PT. Pegadaian Syariah		Padat Karya
22	PT. Unilever melalui Yayasan Rumah Pelangi		Nasio
23	Rumah Zakat		Razby A, Mulya Asri
24	Samudra Indonesia		Kepodang
25	Toyota Astra		Bintang Motropoli
26	Ucare Indonesia		Padat Karya
27	UMIBA		Wijaya Kusuma
28	Unisma		Wijaya Kusuma
29	Univ atmajaya		Wijaya Kusuma
30	Yayasan Dana Mandiri		Nasio

Sumber: Diolah oleh Penulis dari Bank Sampah Induk Patriot (2023)

Desain kebijakan Program Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) di Kota Bekasi disusun dengan memperhatikan prosedur, waktu, dan sumber daya yang jelas, serta melibatkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dukungan regulasi melalui Peraturan Wali Kota Nomor 10A Tahun 2017 memperkuat dasar hukum, struktur organisasi, dan pembiayaan program. Kemitraan dengan lebih dari 30 perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi bukti nyata bahwa desain kebijakan ini tidak hanya bertumpu pada sumber daya pemerintah, tetapi juga mengaktifkan kontribusi sektor swasta. Monitoring rutin dari Dinas Lingkungan Hidup memastikan pelaksanaan program tetap berjalan optimal dan mencegah stagnasi, menjadikan desain kebijakan ini terstruktur, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan ini dirancang dengan fleksibilitas tinggi untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Fleksibilitas operasional seperti penyesuaian jadwal penimbangan sampah, termasuk pada hari libur, menunjukkan bahwa

program bersifat adaptif dan berorientasi pada kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Responsivitas ini memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan efektivitas program. Dengan kombinasi antara struktur kebijakan yang kuat dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika sosial, desain kebijakan BSIP terbukti mampu menjawab tantangan pengelolaan sampah secara partisipatif dan berkelanjutan.

3.1.3 Struktur Pengawasan

Pada dimensi ini, struktur pengawasan dalam Program Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) melibatkan dua lapisan utama, yaitu pengawasan oleh masyarakat dan oleh badan pengawas formal. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan secara tidak terjadwal namun tetap berjalan secara berkala. Partisipasi masyarakat tercermin dari keterlibatan mereka dalam kegiatan sosialisasi dan pemantauan, yang menandakan adanya kesadaran dan kepedulian terhadap keberlangsungan program. Meskipun tidak memiliki jadwal tetap, pengawasan ini cukup efektif dalam mengidentifikasi kendala serta mengevaluasi progres program di tingkat akar rumput.

Di sisi lain, pengawasan formal dijalankan oleh Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sebagai bagian dari struktur Pemerintah Kota Bekasi, sesuai dengan Keputusan Wali Kota yang berlaku. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi rutin setiap bulan serta pelaporan berkala dari Bank Sampah Unit ke Bank Sampah Induk Patriot. Sistem ini memperkuat struktur pelaporan dan memungkinkan pelaksanaan monitoring yang sistematis. Kegiatan monitoring juga disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat, guna memastikan tidak hanya pelaksanaan teknis, tetapi juga pemahaman dan penerimaan program oleh warga.

Namun demikian, terdapat kendala serius dalam pelaksanaan pengawasan, terutama yang berkaitan dengan aspek pendanaan dan konsistensi pelaporan. Minimnya dukungan finansial menyebabkan kurang optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi, serta berkontribusi pada rendahnya tingkat pelaporan dari Bank Sampah Unit—dari 400 unit hanya sekitar 80 yang melapor secara rutin. Situasi ini menunjukkan pentingnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan program. Tanpa pendampingan dan monitoring yang memadai, risiko stagnasi program cukup tinggi. Oleh karena itu, keberhasilan struktur pengawasan sangat bergantung pada sinergi antara masyarakat, BSIP, dan Pemerintah Kota Bekasi, serta komitmen bersama untuk memperkuat aspek pendanaan dan kapasitas operasional.

3.1.4 Desain Kelembagaan

Pada dimensi ini, desain kelembagaan Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) telah diatur secara resmi melalui Peraturan dan Keputusan Wali Kota Bekasi yang menetapkan struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, serta tata kerja BSIP. Kejelasan struktur ini menjadi fondasi penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan program, mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat wilayah. Selain itu, pembaruan rutin terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) memastikan bahwa kelembagaan BSIP tetap relevan dan responsif terhadap dinamika lapangan. Kemitraan strategis dengan organisasi nasional seperti ASOBSI juga memperluas jangkauan koordinasi BSIP di tingkat nasional, yang berpotensi meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Koordinasi dalam struktur kelembagaan BSIP menunjukkan sistem yang bertingkat dan tertata rapi. Dimulai dari Bank Sampah Unit (BSU) di tingkat RW, laporan dan komunikasi disampaikan ke Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan, lalu diteruskan ke BSIP di tingkat kota. Bila diperlukan, BSIP juga dapat menjalin koordinasi lanjutan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Alur koordinasi ini mencerminkan adanya mekanisme komunikasi vertikal

yang sistematis, mempermudah penyampaian informasi, pelaporan kinerja, serta penanganan kendala operasional di lapangan secara berjenjang dan efisien.

Secara keseluruhan, desain kelembagaan BSIP telah mendukung pelaksanaan program secara terstruktur, baik dari segi organisasi maupun mekanisme koordinasi. Namun demikian, efektivitas kelembagaan tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada pelaksanaan fungsional di lapangan. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi dan kapasitas kelembagaan di setiap tingkatan agar mampu merespons tantangan operasional dengan cepat dan tepat. Dukungan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi faktor krusial dalam memperkuat kelembagaan BSIP agar lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.



Sumber: Keputusan Walikota Bekasi 600. 4/kep.544 – DLH/IX/2024

Struktur Organisasi Bank Sampah Induk Patriot Tahun 2024-2027

3.1.5 Kemampuan Administratif

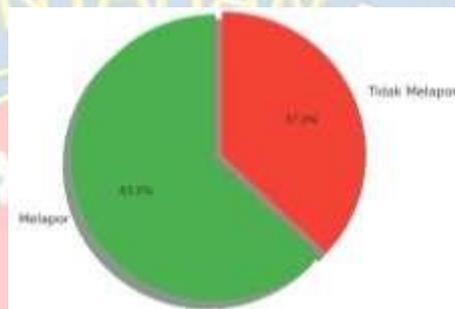
Kemampuan administratif Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) Kota Bekasi menunjukkan bahwa dari sisi ketersediaan sumber daya, program ini telah memiliki struktur yang cukup baik. Tersedianya sumber daya manusia di seluruh kecamatan, lengkap dengan pengurus dan koordinator wilayah, memungkinkan operasional bank sampah berjalan di berbagai tingkat, mulai dari induk hingga unit RW. Dari sisi teknologi, fasilitas seperti mesin press, kendaraan operasional, dan timbangan yang tersebar di setiap Bank Sampah Unit menjadi bukti bahwa BSIP memiliki dukungan teknologi yang memadai untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah secara efisien.

Meskipun ketersediaan sumber daya sudah cukup, dari segi kecukupan, BSIP masih menghadapi tantangan serius dalam hal keuangan dan informasi. Dana operasional yang bersumber dari APBD dan CSR bersifat terbatas dan tidak sepenuhnya mampu menopang kegiatan penting seperti monitoring, evaluasi, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat. Akibatnya, beberapa program penting tidak dapat dijalankan secara optimal. Di sisi lain, meskipun memiliki media sosial dan website, aktivitas penyampaian informasi digital belum dijalankan secara konsisten, sehingga mempengaruhi efektivitas penyebaran informasi dan dokumentasi kegiatan.

Dalam aspek pelaksanaan SOP (*Standart Operating Procedure*), BSIP telah memiliki prosedur operasional yang dirancang untuk menjamin kelancaran pengelolaan bank sampah. Namun, implementasi SOP tersebut, terutama dalam hal pelaporan bulanan dari Bank Sampah Unit (BSU), masih menghadapi kendala. Tidak semua BSU secara konsisten menyampaikan

laporan, sebagian besar disebabkan oleh sifat kegiatan yang berbasis sosial dan dilakukan secara sukarela. Ini berdampak pada tidak optimalnya proses evaluasi dan pengawasan yang seharusnya menjadi bagian dari siklus manajemen program.

Secara keseluruhan, dimensi kemampuan administratif BSIP dapat dikatakan cukup baik dalam aspek penyediaan sumber daya manusia dan teknologi, tetapi masih memiliki kekurangan dalam aspek pendanaan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi. Ketidakteraturan dalam pelaporan serta kurangnya aktivitas dalam penyebaran informasi melalui media digital menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem pelaporan, insentif untuk meningkatkan partisipasi relawan, serta peningkatan penggunaan media digital secara konsisten untuk mendukung keberlanjutan program Bank Sampah Induk Patriot di Kota Bekasi.



Sumber: Diolah oleh penulis dari Bank Sampah Induk Patriot, 2025

Jumlah Bank Sampah Unit yang melapor pada tahun 2024

3.1.6 Penerimaan Sosial

Berdasarkan analisis terhadap dimensi penerimaan sosial, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Program Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) di Kota Bekasi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat merasakan manfaat langsung dari program tersebut. Tingkat penerimaan masyarakat terlihat cukup tinggi, sebagaimana tercermin dari antusiasme warga, termasuk mereka yang berada di luar wilayah RW, untuk turut serta menabung sampah. Selain itu, penyebaran informasi yang dominan melalui komunikasi informal membuktikan bahwa program ini memiliki efek positif yang nyata dalam kehidupan masyarakat, baik dari segi kebersihan lingkungan maupun nilai ekonomi. Hal ini diperkuat oleh data peningkatan nilai ekonomi sampah sebesar 380,8% dari tahun 2023 ke 2024, yang mencerminkan bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap program.

Namun, penerimaan sosial juga menghadapi tantangan. Masih terdapat sebagian masyarakat yang enggan terlibat dengan berbagai alasan seperti gengsi, rasa malas, hingga kurangnya pemahaman terhadap manfaat program. Sistem yang belum sepenuhnya memfasilitasi kemudahan warga seperti tidak adanya layanan jemput sampah juga menjadi faktor penghambat. Meskipun demikian, kritik atau penolakan dari sebagian kalangan belum cukup signifikan untuk menghambat laju partisipasi masyarakat secara umum, yang justru terus menunjukkan tren positif.

Dalam hal keterlibatan masyarakat, program ini berhasil menggerakkan partisipasi aktif warga, khususnya dari kalangan ibu rumah tangga. Kegiatan pemilahan, penimbangan, dan pengangkutan sampah dilakukan secara sukarela dan konsisten, bahkan memanfaatkan ruang pribadi seperti teras rumah warga sebagai lokasi kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif warga sudah berkembang ke arah pengelolaan yang berkelanjutan. Stabilitas jumlah

nasabah, seperti yang terlihat pada Bank Sampah Unit Niagatama Asri, mencerminkan tingkat konsistensi dan kesadaran yang tinggi dalam praktik pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Secara keseluruhan, dimensi penerimaan sosial menjadi salah satu penentu utama keberhasilan Program Bank Sampah Induk Patriot di Kota Bekasi.

3.2 Upaya Mengoptimalkan Program Bank Sampah Induk Patriot

Upaya optimalisasi Program Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) di Kota Bekasi menunjukkan adanya komitmen kuat dari pengelola dalam menjawab berbagai tantangan implementasi kebijakan, khususnya pada aspek pendanaan. Strategi yang dilakukan antara lain peningkatan nilai jual sampah melalui pengolahan awal, menjalin kemitraan dengan lapak, menyisihkan sebagian dana dari kegiatan internal, serta menggali dukungan CSR dari sektor swasta. Pendekatan ini tidak hanya memperluas sumber pembiayaan, tetapi juga memperkuat keberlanjutan program secara mandiri. Penguatan internal dalam pengelolaan kerja sama, yang dilakukan secara lebih profesional sejak 2024, menunjukkan adanya perbaikan tata kelola kelembagaan yang lebih matang.

Selain aspek pendanaan, sistematika pelaporan rutin menjadi langkah strategis berikutnya yang dilakukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program. Dengan menerapkan sistem pelaporan berjenjang dan format standar bagi seluruh Bank Sampah Unit (BSU), proses pemantauan dan evaluasi menjadi lebih efisien dan terstruktur. Peningkatan jumlah BSU yang aktif melapor dari 208 unit pada tahun 2023 menjadi 247 unit pada tahun 2024, mencerminkan hasil positif dari upaya tersebut. Kenaikan tingkat partisipasi pelaporan ini juga menjadi indikator semakin kuatnya kesadaran dan kepatuhan BSU terhadap mekanisme akuntabilitas internal.

Secara keseluruhan, strategi optimalisasi yang diterapkan oleh BSIP membuktikan bahwa meskipun terdapat keterbatasan anggaran dari pemerintah, keberhasilan program tetap dapat dicapai dengan inovasi, kolaborasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Langkah-langkah konkret seperti peningkatan sistem pelaporan dan eksplorasi berbagai sumber pendanaan telah membawa dampak positif dalam menjaga kontinuitas serta kualitas program pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Bekasi. Hal ini menjadi contoh bagaimana pendekatan adaptif dan partisipatif dapat menjadi kunci sukses implementasi kebijakan publik di tingkat lokal.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Program Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) di Kota Bekasi telah dilakukan dengan pendekatan partisipatif berbasis masyarakat, namun masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Menggunakan teori implementasi kebijakan dari Knill & Tosun (2020), penelitian ini menyoroti enam faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu pemilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa BSIP telah memiliki struktur kelembagaan yang cukup kuat serta dukungan peraturan yang jelas dari pemerintah daerah. Namun, pelaksanaannya di lapangan menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, pelaporan dari unit bank sampah yang tidak konsisten, serta rendahnya tingkat edukasi dan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah. Selain itu, keterbatasan anggaran dan fasilitas teknologi juga menjadi penghambat dalam optimalisasi kebijakan pengelolaan sampah ini.

Penelitian ini menemukan bahwa walaupun jumlah unit bank sampah bertambah dari tahun ke tahun, volume sampah yang dikelola justru menurun, menandakan belum optimalnya pemanfaatan kapasitas yang tersedia. Dukungan dari sektor swasta melalui CSR dan kemitraan

dengan berbagai pihak telah mulai dilakukan, namun belum merata di seluruh wilayah Kota Bekasi. Strategi yang digunakan BSIP dalam mengatasi kendala tersebut antara lain adalah dengan meningkatkan insentif, memperkuat koordinasi antar unit, serta memperluas kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya oleh Abdussamad et al. (2022) di Kabupaten Bone Bolango, terdapat kesamaan dalam kendala rendahnya kesadaran masyarakat dan pentingnya edukasi lingkungan. Namun berbeda dengan fokus penelitian ini yang lebih menekankan pada evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor implementasi kebijakan, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pendekatan regulasi dan perilaku masyarakat. Sementara itu, penelitian Cahyadi et al. (2018) di Purbalingga juga menunjukkan kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya, mirip dengan temuan penelitian ini dalam hal ketidakefektifan pemanfaatan bank sampah meskipun secara kelembagaan telah terbentuk. Dewi (2019) bahkan menyoroti kegagalan total program karena rendahnya partisipasi masyarakat, yang menjadi pembelajaran penting bagi Kota Bekasi dalam memperkuat komunikasi publik dan nilai ekonomi dari pengelolaan sampah.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah pendekatan komprehensif terhadap implementasi kebijakan berbasis masyarakat melalui analisis enam dimensi dari Knill & Tosun secara sistematis, dan menyajikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan BSIP sebagai kebijakan pengelolaan sampah yang adaptif terhadap tantangan lokal. Hal ini memberikan kontribusi teoretis sekaligus praktis bagi pengembangan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan inklusif di daerah urban seperti Kota Bekasi.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini juga menemukan sejumlah temuan menarik yang memberikan wawasan tambahan dalam memahami implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Bekasi. Salah satu temuan yang mencolok adalah peran aktif komunitas dan relawan dalam menjalankan kegiatan operasional Bank Sampah Unit (BSU), khususnya dalam melakukan edukasi langsung kepada warga dan menggerakkan kegiatan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Meskipun secara formal pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan lembaga BSIP, keterlibatan relawan ini menjadi ujung tombak dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan.

Hal lain yang menarik adalah ditemukannya penggunaan sistem pencatatan manual oleh sebagian besar BSU, yang justru mencerminkan adanya keterbatasan dalam adopsi teknologi informasi di level akar rumput. Meskipun BSIP telah memiliki *website* dan kanal digital sebagai bagian dari sistem *e-reporting*, masih banyak BSU yang belum mampu mengakses atau memanfaatkan platform tersebut secara optimal. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan digital yang berdampak pada efektivitas pelaporan dan monitoring, serta menandakan perlunya pendekatan digitalisasi yang lebih inklusif dan pelatihan teknis bagi pengelola di tingkat unit.

Selain itu, penulis juga menemukan bahwa motivasi ekonomis menjadi penggerak utama partisipasi masyarakat dalam program BSIP. Insentif dari hasil penjualan sampah dan program CSR menjadi daya tarik utama bagi warga untuk ikut serta, dibandingkan dorongan terhadap aspek lingkungan semata. Hal ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi masih menjadi kunci dalam memobilisasi partisipasi publik, terutama di wilayah urban dengan dinamika sosial yang kompleks seperti Kota Bekasi.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh faktor struktural dan peraturan formal, tetapi juga oleh dinamika sosial,

motivasi warga, dan kemampuan organisasi pelaksana untuk beradaptasi terhadap kondisi lokal. Pendekatan berbasis komunitas, komunikasi interpersonal, dan pemanfaatan sumber daya sosial lokal menjadi aspek penting yang sering kali luput dari perhatian dalam evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini turut memperkaya pemahaman tentang pentingnya dimensi sosial dan kultural dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Program Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) di Kota Bekasi telah berjalan dengan cukup baik namun belum optimal. Mengacu pada teori implementasi kebijakan dari Knill & Tosun (2020), pelaksanaan BSIP telah mencakup enam dimensi penting, yaitu pemilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi telah menetapkan berbagai regulasi dan kelembagaan pendukung seperti Peraturan Walikota dan struktur organisasi BSIP. Namun demikian, masih ditemukan beberapa hambatan dalam implementasinya, di antaranya ketidakseimbangan antara jumlah unit bank sampah yang meningkat dengan volume sampah yang dikelola yang justru menurun, keterbatasan dana, minimnya pelaporan dari BSU, dan kurangnya literasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. BSIP telah menunjukkan komitmen melalui berbagai strategi, seperti pelibatan CSR, edukasi masyarakat, dan peningkatan nilai ekonomi sampah. Namun, untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan program, dibutuhkan penguatan koordinasi antarunit pelaksana, digitalisasi sistem pelaporan, serta peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada struktur formal dan regulasi, tetapi juga pada inovasi lapangan, kolaborasi multipihak, serta pemberdayaan komunitas secara berkelanjutan. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek waktu pelaksanaan yang relatif singkat dan ruang lingkup pengamatan yang terbatas pada satu kota, yakni Kota Bekasi. Hal ini mempengaruhi kedalaman analisis terhadap proses implementasi kebijakan secara longitudinal, khususnya dalam menilai perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Selain itu, pendekatan penelitian yang digunakan masih bersifat deskriptif kualitatif, sehingga belum dapat memberikan data kuantitatif mengenai efektivitas atau dampak nyata dari Program BSIP terhadap pengurangan timbulan sampah secara menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Melihat pentingnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif guna mengukur dampak Program BSIP secara lebih objektif, seperti terhadap jumlah sampah yang berhasil dikelola, perubahan perilaku masyarakat, dan kontribusinya terhadap ekonomi lokal. Penelitian komparatif antar daerah juga diperlukan untuk mengetahui variasi implementasi kebijakan bank sampah dan faktor kunci keberhasilannya. Selain itu, kajian terhadap pemanfaatan teknologi digital seperti sistem *e-reporting*, aplikasi pemilahan sampah, dan integrasi data BSIP dengan sistem informasi pemerintah daerah juga penting dilakukan guna meningkatkan efisiensi pengelolaan. Penulis juga menyarankan eksplorasi lebih lanjut terhadap aspek kepemimpinan, budaya organisasi, dan partisipasi aktor non-pemerintah dalam mendukung efektivitas program bank sampah di daerah urban maupun rural.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama penulis ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi beserta seluruh jajarannya termasuk juga Direktur Bank Sampah Induk Patriot beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, dan berkontribusi dalam kelancaran serta kesuksesan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J., Tui, F. P., Mohamad, F., & Dunggio, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(4), 850–868. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i4.504>.
- Cahyadi, A., Sriati, S., & Al Fatih, A. (2018). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di kabupaten Purbalingga. *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS)*, 2(2), 20-24. <http://www.ejournal-pps.unsri.ac.id/index.php/dejos/article/view/36>.
- Dewi, R. P. (2019). *Implementasi Kebijakan Program Bank Sampah di Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh*.
- Fadlurrohman, F. (2022). *TPA Sumur Batu Overload, Pemkot Bekasi Imbau Warga Tak Asal Buang Sampah*. <https://news.detik.com/berita/d-6088236/tpa-sumur-batu-overload-pemkot-bekasi-imbau-warga-tak-asal-buang-sampah>.
- Khairi, H. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Atmospheric Environment*, 42(13), 2934-2947.
- Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public Policy: A New Introduction*. Macmillan International Higher Education.
- Malek, W., Mortazavi, R., Cialani, C., & Nordström, J. (2023). How have waste management policies impacted the flow of municipal waste? An empirical analysis of 14 European countries. *Waste Management*, 164, 84-93. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2023.03.040>.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Punch, K. (2009). *Introduction to Research Methods in Education*. Sage.
- Rahmadanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2018). Implementasi Kebijakan Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan Smart City Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 44(2), 81-106.
- Rokhamah, Yana, P. R., Hernadi, N. A., Rachmawati, F., Irwanto, Dey, N. P. H., Purwanti, E. W., Bawono, R. N. Y., Rianto, Masruha, Kosasih, Mola, M. S. R., Djumaty, B. L., & Putra, G. K. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori, Metode dan Praktik)*. Penerbit Widina Media Utama.
- Solihah, M., & Rohman, A. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Program Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan dalam Perspektif SKB dan Fiqh Al-Bi'ah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6). <https://doi.org/10.62281/v2i6.552>.
- Torkayesh, A. E., Rajaeifar, M. A., Rostom, M., Malmir, B., Yazdani, M., Suh, S., & Heidrich, O. (2022). Integrating life cycle assessment and multi criteria decision making for

sustainable waste management: key issues and recommendations for future studies. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 168, 112819. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112819>.

Wahyudin, I., & Susetyo, I. B. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Program Bank Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(4), 310–319.

Wijayanti, D. R., & Suryani, S. (2015). Waste bank as community-based environmental governance: a lesson learned from Surabaya. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 184, 171-179. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.077>.

